



PASAR MODERN PERLU BERI PENDAMPINGAN

Minimarket Ancam Pasar Tradisional

YOGYA (KR) - Keberadaan minimarket yang kian menjamur saat ini, dirasakan semakin mengancam keberadaan pasar-pasar tradisional. Sebab banyak pembeli pasar tradisional yang beralih ke pasar retail modern yang kian dekat dengan masyarakat ini. Karena itu perlu dipikirkan upaya untuk melindungi pasar tradisional.

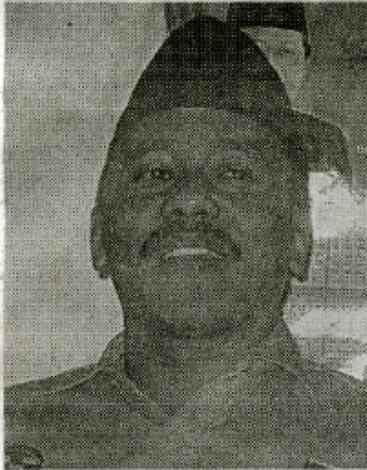
Demikian antara lain pendapat yang mengemuka pada diskusi terbatas di Hafidh Centre Jl Pandega Rini Kentungan Yogyakarta, Rabu (22/7). Diskusi menghadirkan nara sumber anggota DPD RI asal DIY Drs HA Hafidh Asrom MM dan Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Pemkot Yogyakarta Drs H Ahmad Fadli. Pada kesempatan itu Hafidh Asrom juga menyosialisasikan keberadaan DPD serta memaparkan berbagai kegiatannya mengisi masa reses.

Menurut Hafidh Asrom, jumlah pasar/toko modern di DIY sudah cukup banyak, bahkan hampir sama dengan jumlah pasar tradisional. Sesuai data Disperindagkop Propinsi DIY, jumlah pasar/toko modern lebih dari 200 kategori, sedang pasar tradisional ada sekitar 338. "Awalnya saya salut dengan kebijakan Pemkab Bantul yang tidak membuka peluang berdirinya mal guna melindungi pasar tradisional, tetapi kenyataannya di sana sekarang justru

bermunculan minimarket, padahal ini juga mengancam pasar tradisional," paparnya.

Menurut Ahmad Fadli, keberadaan mal-mal atau pasar modern tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Justru yang cukup terasa adalah munculnya pasar-pasar retail modern. Dicontohkan pengunjung Pasar Sentul berkurang karena tak jauh dari lokasi ini berdiri minimarket.

Untuk melindungi pasar tradisional, lanjutnya, Pemkot Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur pendirian pasar retail modern, antara lain hanya boleh dibuka di pinggir jalan-jalan utama, tidak boleh di pinggir jalan kecil atau jalan masuk perkampungan. "Besok Sabtu (25/7) isi Perwal



KR-AHMAD LUTHFIE

Ahmad Fadli dan Hafidh Asrom.

ini juga akan kita kaji lagi," tambahna.
Sedang Hafidh Asrom berpendapat, agar munculnya pasar modern tidak 'mematikan' eksistensi pasar tradisional, maka diperlukan 'konsis-

tensi' pihak berwenang dan pengusaha atau pemodal dalam menerapkan Perpres No 112 Tahun 2007 yang mengatur tentang pendirian pasar modern dan pasar tradisional. Juga harus diikuti *political*

will pemerintah daerah untuk membuat Perda sehingga bisa berjalan optimal.

Selain itu, pemberdayaan/revitalisasi pasar tradisional juga harus terus menerus dilakukan oleh pemerintah, khususnya menyangkut kehidupan usaha UMKM, dengan cara memberikan akses informasi, permodalan dan hubungan antara produsen dengan suplier.

"Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan atau CSR, sudah saatnya pasar modern memberikan pendampingan dan bantuan pengembangan maupun penjualan produk/dagangan yang lebih murah kepada para pedagang pasar atau toko-toko kelontong yang lokasinya berdekatan dengan pasar modern," harapnya. **(Fie) -s**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pengelolaan Pasar			

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005